

Implementasi Program Merdeka Belajar Di SMA Negeri 9 Makassar

M. IQBAL¹, Syamsurijal Basri², Irmawati³

^{1,2,3} Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

Info Artikel	ABSTRAK
<p>Sejarah Artikel: Diterima: bulan, tahun Disetujui: bulan, tahun Dipublikasi: bulan, tahun</p> <hr/> <p>Kata kunci: Pengelolaan, Kurikulum</p> <p>Keywords: Management, Curriculum</p> <hr/> <p>Corresponding Author: alamat e-mail: miqbal13120@gmail.com rijal@unm.ac.id</p>	<p>Penelitian ini mengkaji tentang implementasi program Merdeka Belajar di SMA Negeri 9 Makassar terkait pelaksanaan serta faktor pendukung dan penghambat dari Program Merdeka Belajar. Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 9 Makassar. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Merdeka Belajar di SMA Negeri 9 Makassar, diantaranya: 1). Ujian Nasional, Ujian Nasional ditiadakan dan muncul program baru yaitu Asesmen Nasional, Asesmen Nasional. Pelaksanaan dilakukan mulai tahap sosialisasi, simulasi dan gladi bersih kepada peserta didik yang terpilih menjadi peserta ujian. 2). Ujian Sekolah Berstandar Nasional, persiapan pelaksanaan USBN dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh sekolah serta menyiapkan soal ujian bagi masing-masing guru mata pelajaran yang bersangkutan. 3). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebelum menyusun RPP para guru melakukan asesmen awal dengan <i>diagnostik non kognitif</i> untuk mengetahui kebutuhan peserta didik. 4). Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berlangsung secara online dan pada jalur Zonasi lebih difleksibelkan dengan perluasan kuota penerimaan hingga 50%. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program Merdeka Belajar di SMA Negeri 9 Makassar dalam pelaksanaan keempat program merdeka belajar yakni secara garis besar faktor pendukungnya berasal dari sarana dan prasarana yang memadai, kesiapan panitia pelaksanaan yang baik dan adanya asesmen diagnostik non kognitif dalam penyusunan RPP. Kemudian untuk faktor penghambatnya berasal dari peserta ujian yang terlambat mengikuti ujian serta aliran listrik yang kurang stabil dalam pelaksanaan kegiatan.</p>

ABSTRACT

This research examines the implementation of the Merdeka Belajar program at SMA Negeri 9 Makassar regarding the implementation as well as supporting and inhibiting factors of the Merdeka Belajar Program. This research approach uses descriptive qualitative. The research was carried out at SMA Negeri 9 Makassar. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. The data analysis technique is carried out in stages starting from data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show that the implementation of the Independent Learning program at SMA Negeri 9 Makassar, includes: 1). National Examination, National Examination was abolished and a new program emerged, namely National Assessment, National Assessment. Implementation is carried out starting from the socialization, simulation and clean rehearsal stages for students who are selected to be exam participants. 2). National Standard School Examination, preparation for the implementation of USBN is carried out by a committee formed by the school and prepares examination questions for each teacher in the subject concerned. 3). Learning Implementation Plan (RPP) before preparing the RPP, teachers carry out an initial assessment using non-cognitive diagnostics to determine students' needs. 4). Admission of New Students (PPDB) takes place online and the Zoning route is more flexible by expanding the admission quota to 50%. Supporting and inhibiting factors in the implementation of the Independent Learning program at SMA Negeri 9 Makassar in the implementation of the four independent learning programs, in general, the supporting factors come from adequate facilities and infrastructure, good readiness of the implementation committee and the existence of non-cognitive diagnostic assessments in the preparation of the RPP. Then the inhibiting factors come from examinees who are late in taking the exam and unstable electricity supply during the implementation of activities.

© 2024 M IQBAL, Syamsurijal Basri, Irmawati

This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license



PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam penyokong pembangunan nasional bangsa Indonesia, yang telah tercantum dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 pada Alinea keempat. Pada bagian tersebut dijelaskan bahwa Pendidikan

harus bisa sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia, sehingga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk dapat mewujudkannya. Pendidikan adalah upaya dan usaha yang dilakukan oleh individu dewasa untuk memiliki nalar dan mengatur moral peserta didiknya (Agnes, 2020). Pendidikan juga termasuk ke dalam hak dan kewajiban dari setiap individu di negara Indonesia, dimana dalam Undang-Undang sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No.20 tahun 2003 pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa:

"setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu". Fungsi dan tujuan Pendidikan nasional yang tak lain adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, keratif, serta masyarakat yang dinamis, sistem Pendidikan pun ikut mengalami transpormasi demi penyesuaian terhadap globalisasi yang terjadi. (Sumarsih et al., 2022). Kurikulum merupakan sebuah kerangka dasar sebagai acuan dalam pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan yang mencakup berbagai macam aspek, seperti mata pelajaran, sistem pembelajaran hingga teknik dalam pelaksanaan assesmen peserta didik. Proses pendidikan mampu melahirkan ide-ide yang kreatif, inovatif dalam dinamika perkembangan zaman. Pengembangan kurikulum merupakan instrumen untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kebijakan pendidikan yang benar akan tampak melalui implementasi kurikulum yang diterapkan karena kurikulum merupakan jantung pendidikan yang menentukan berlangsungnya Pendidikan (Munandar, 2017). Pengimplementasian kurikulum di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan yaitu tahun 1947, tahun 1964, tahun 1968, tahun 1973, tahun 1975, tahun 1984, tahun 1994, tahun 1997 (revisi kurikulum 1994), tahun 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi), dan kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan), dan pada tahun 2013 pemerintah melalui kementerian pendidikan nasional mengganti kembali menjadi kurikulum 2013 (Kurtilas) dan pada tahun 2018 terjadi revisi menjadi Kurtilas Revisi" (Ulinniam et al., 2021). Kurikulum selalu dinamis dan senantiasa dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dalam faktor yang mendasarinya. Untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah senantiasa melakukan berbagai inovasi dalam perancangan kurikulum. Pada saat ini hadirlah sebuah kurikulum baru yaitu kurikulum merdeka yang di atur dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dan di atur juga dalam Mendikbudristek No.262/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Di mana kurikulum Merdeka belajar dimaknai sebagai desain pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dengan tenang, santai, menyenangkan, bebas stres dan bebas tekanan, untuk menunjukkan bakat alaminya. Berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya, dewasa ini dibutuhkan sebuah paradigma baru dalam pembelajaran melalui penerapan Kurikulum Merdeka dengan konsep Merdeka Belajar dimana para guru harus mampu untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan lingkungan belajar yang menyenangkan serta memperhatikan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Penerapan Kurikulum Merdeka ini semata-mata untuk menyempurnakan aspek-aspek

yang masih kurang pada kurikulum-kurikulum sebelumnya sehingga pada hakikatnya tidak mengubah ideologi pendidikan kita melainkan menyempurnakan sehingga tercipta sistem pendidikan yang baik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Merdeka belajar berfokus pada kebebasan dan pemikiran kreatif. Keunggulan Kurikulum Merdeka bila dibandingkan dengan kurikulum pendahulunya terletak pada adanya kebebasan dalam perancangan kurikulum di satuan pendidikan dalam arti bahwa proses pembelajaran harus berjalan menarik, menyenangkan, berpusat pada kebutuhan dan potensi peserta didik serta berlangsung bertahap tanpa terburu-buru. Kurikulum Merdeka mengusung konsep “Merdeka Belajar” yang berbeda dengan kurikulum 2013, bermakna bahwa sekolah diberikan kebebasan dalam menyusun kurikulumnya sesuai dengan potensi yang dimiliki sekolah maupun potensi yang dimiliki daerah di sekitar lingkungan sekolah. Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) menjadi landasan utama sekolah dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka (Sherly et al., 2020). Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan bahwa SMA Negeri 9 Makassar telah menerapkan kurikulum Merdeka sejak tahun 2021. Memiliki 23 ruang belajar dan 60 guru. Penerapan kurikulum Merdeka di lakukan pada tingkatan kelas X dan XI dengan tidak ada lagi pembagian jurusan. Perencanaan kurikulum merdeka telah diatur dalam SOP kurikulum merdeka. Pelaksanaannya berbeda dengan kurikulum yang terdahulu, di mana sistem penilaiannya dalam aspek keterampilan, kemampuan dan sikap tetapi secara holistik dengan artian bahwa meskipun peserta didik memiliki pengetahuan yang tinggi tetapi sikap peserta didik tersebut kurang baik maka penilainya tetap rendah. Alasan peneliti ingin melakukan penelitian di SMA Negeri 9 Makassar ini juga dikarenakan belum ada penelitian di sekolah ini mengenai pelaksanaan kurikulum Merdeka, beberapa hanya meneliti mengenai pembelajaran dalam kelas mengenai kurikulum Merdeka, kemudian peneliti dengan sengaja tidak berfokus pada evaluasi dari kurikulum merdeka karena waktu penelitian yang tidak efektif dan efisien. Beberapa penelitian tentang peran implementasi kurikulum merdeka juga telah diteliti oleh Elda Suci Putri Aida (2023) dengan judul “Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar di SDIT Sabilul Huda Kota Cirebon” yang berfokus pada perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi kurikulum merdeka, kemudian Alfi Samsudduha (2023) dengan Judul “Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Di Sma Negeri 1 Tanjung Jabung Timur” yang berfokus pada permasalahan yang terdapat di sekolah terkait pelaksanaan kurikulum merdeka. Berdasarkan penelitian relevan di atas, yang membahas mengenai implementasi kurikulum dalam pembelajaran maka berbeda dengan penelitian yang akan saya lakukan, penelitian yang akan saya lakukan yakni ingin mengkaji mengenai bagaimana pengimplementasian Program merdeka berdasarkan pelaksanaan serta faktor pendukung dan penghambat di SMA Negeri 9 Makassar melalui penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang terkait, di antaranya Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru dan Guru Penggerak. Penelitian ini berfokus untuk melihat bagaimana gambaran perencanaan serta pelaksanaannya. Pengimplementasian kurikulum Merdeka Belajar di SMA Negeri 9 Makassar dapat dikatakan hal yang baru karena penerapannya belum begitu lama di sekolah.

METODE

Data dalam penelitian ini yaitu mengenai hasil observasi Implementasi Program Merdeka Belajar di SMA Negeri 9 Makassar. Data tersebut didapatkan melalui observasi dan pedoman wawancara. Data tersebut diperoleh dari subjek penelitian yaitu wakil kepala sekolah, guru, dan guru penggerak yang berada di SMA Negeri 9 Makassar. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif yaitu berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan sebagai pendukung seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2018)

HASIL

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian memberikan informasi mengenai letak lokasi yang menjadi tempat penelitian yang dilakukan peneliti dalam memperoleh informasi serta data yang akurat. Di bawah ini akan dipaparkan mengenai sejarah singkat, identitas, visi misi sampai pada keadaan atau kondisi sarana dan prasarana lokasi penelitian.

a) Visi, Misi dan Tujuan SMA Negeri 9 Makassar

SMA Negeri 9 Makassar merupakan salah satu sekolah penggerak yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang menggambarkan profil pelajar Pancasila yang diwujudkan melalui visi misi sekolah berikut ini:

1) Visi

Mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berwawasan luas dan peduli lingkungan dalam semangat Pancasila.

2) Misi

1. Menjadikan guru sebagai model pembelajaran yang menjadi contoh inspiratif bagi peserta didik
2. Mengamalkan agama sesuai perintah agama
3. Membiasakan sikap jujur, adil, dan mandiri dalam tindakan
4. Mengedepankan sikap santun dalam berkomunikasi
5. Membudayakan belajar tekun dan bekerja keras dalam mengatasi masalah
6. Menumbuhkembangkan potensi kreativitas
7. Mengasah kemampuan kognitif, psikomotorik secara efektif sehingga mampu bertahan dalam berbagai keadaan
8. Mendorong dan melatih semangat berprestasi serta kemampuan berkompetisi menghadapi persaingan global
9. Memupuk budaya peduli dan rasa empati terhadap lingkungan sekitar
10. Melatih sikap gotong royong dalam menghadapi masalah bersama
11. Menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air
12. Melestarikan kearifan local sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa

b) Keadaan Peserta Didik SMA Negeri 9 Makassar

Peserta didik SMA Negeri 9 Makassar terkait jumlahnya tidak berbeda jauh dari tahun-tahun sebelumnya, hanya saja model penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara online dari tahun lalu jumlah pendaftar lebih banyak. Adapun tamatan lulusan di sekolah ini setiap tahunnya hampir mencapai persentase seratus persen. Untuk keterangan lebih lengkap dapat dilihat dari table di bawah ini:

Tabel 4. 1 Keadaan Peserta Didik SMAN 9 Makassar

Tingkatan Kelas	Peserta Didik		Jumlah Peserta Didik	Jumlah Rombel
	Laki-Laki	Perempuan		
Kelas X	195	231	426	12
Kelas XI IPA	92	118	210	6
Kelas XI IPS	64	72	136	4
Kelas XII IPA	97	112	209	8
Kelas XII IPS	79	68	147	4
Jumlah :	527	601	1128	34

Sumber: Dokumentasi SMA Negeri 9 Makassar Tahun 2023

c) Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA Negeri 9 Makassar

Para pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 9 Makassar secara keseluruhan sudah cukup baik serta telah memenuhi kebutuhan profesi seorang guru. Hal ini dapat dilihat dari kualifikasi pendidikan para guru, seluruhnya memenuhi syarat sebagai guru di tingkat lanjutan begitupun dengan tenaga kependidik yang juga memiliki peran penting dalam pengelolaan administrasi di sekolah. Keadaan pendidik dan tenaga kependidikan secara rinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4. 2 Keadaan Tenaga Pendidik SMAN 9 Makassar

Jenis Kepegawaian	Jenis Kelamin		Kualifikasi pendidikan			Tersertifikat	
	L	P	S1	S2	S3	Sudah	Belum
ASN	13	32	30	14	1	37	8
GTT	10	16	20	6	0	2	24
Jumlah	23	48	50	20	1	39	32

Sumber: Dokumentasi SMA Negeri 9 Makassar Tahun 2023

Tabel 4. 3 Keadaan Pegawai SMAN 9 Makassar

Jenis Kepegawaian	Jenis Kelamin		Kualifikasi pendidikan				
	L	P	SD	SMP	SMA	D3	S1
ASN	1	6	0	0	2	0	5
PTT	3	3	2	1	0	0	3
Jumlah	4	9	2	1	2	0	8

Sumber: Dokumnetasi SMA Negeri 9 Makassar 2023

d) Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di SMA Negeri 9 Makassar dapat dikatakan cukup lengkap mulai dari ruang kelas sampai pada sekretariat ekstrakurikuler. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang proses pembelajaran di sekolah, oleh karena itu sekolah ini cukup memperhatikan keadaan sarana dan

prasarasannya agar tetap dapat digunakan dengan baik. Berikut ini, beberapa sarana dan prasarana di SMA Negeri 9 Makassar secara lengkap dapat dilihat dari table berikut ini:

Tabel 4. 4 Keadaan Sarana dan Prasarana SMAN 9 Makassar

1. Ruang Belajar, Laboratorium dan Perpustakaan

Ruang	Jumlah	Kondisi
Kelas Belajar	32	Baik
Laboratorium Biologi	1	Baik
Laboratorium Fisika	1	Baik
Laboratorium Kimia	1	Baik
Laboratorium Bahasa	1	Rusak
Laboratorium Komputer	1	Baik

Sumber: Dokumnetasi SMA Negeri 9 Makassar 2023

2. Ruang Kepala Sekolah, Wakasek, Ruang BK dan TU

Ruang	Jumlah	Kondisi
Kepala Sekolah	1	Baik
Wakasek	1	Baik
Guru	1	Baik
BK	1	Baik
TU	1	Baik
Gudang Alat Olahraga	1	Baik

Sumber: Dokumentasi SMA Negeri 9 Makassar Tahun 2023

3. Ruang Sekretariat Kegiatan Ekstrakurikuler

Ruang	Jumlah	Kondisi
OSIS	1	Baik
PRAMUKA	1	Baik
PMR	1	Baik
IKRAMUL	1	Baik
PASKIBRA	1	Rusak
SANGGAR SENI	1	Baik

Sumber: Dokumentasi SMA Negeri 9 Makassar Tahun 2023

4. Sarana Olahraga dan Ibadah

Ruang/Lapangan	Jumlah	Kondisi
Lapangan Upacara	1	Baik
Lapangan Futsal	1	Baik
Lapangan Voli	1	Baik
Lapangan Basket	1	Rusak
Masjid	1	Rusak
Marbot Masjid	1	Baik

Sumber:Dokumentasi SMA Negeri 9 Makassar Tahun 2023

5. WC/Toilet

WC/Toilet	Jumlah	Kondisi
Toilet Peserta Didik	16	Baik
Toilet Guru	1	Baik
Toilet Kepsek	1	Baik
Toilet Pegawai TU	1	Baik

Sumber: Dokumentasi SMA Negeri 9 Makassar Tahun 2023

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian yang telah melalui tahap reduksi data dengan menafsirkan data yang telah diperoleh di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi maka didapatkan penjelasan informasi yang didukung oleh dokumen tasi berupa dokumen, gambar/foto yang terkait untuk mempertegas makna data yang tela diperoleh. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mendapatkan informasi mengenai kebijakan program Merdeka Belajar yang berfokus pada keempat pokok gagasan perubahan dalam program merdeka belajar yaitu Ujian Nasional (UN), Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dikaji dalam aspek pelaksanaan serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian kebijakan Program Merdeka Belajar di SMA Negeri 9 Makassar.

a) Pelaksanaan Program Merdeka Belajar

1. Ujian Nasional

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan yang didukung dengan beberapa dokumentasi yang didapatkan, maka pelaksanaan Asesmen Nasional yang diisukan sebagai pengganti dari Ujian Nasional memiliki beberapa kesamaan dalam pelaksanaan teknisnya tetapi konteksnya berbeda sehingga evaluasinya pun berbeda. Pada Ujian Nasional, semua peserta didik kelas XII diikutsertakan dalam ujian tetapi pada Asesmen Nasional ini peserta ujiannya hanya beberapa peserta didik yang dipilih secara acak oleh pemerintah untuk mengikuti ujian Asesmen Nasional.

2. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan berbagai informan serta dokumentasi yang peneliti temukan di lapangan maka dapat diketahui bahwa Ujian Sekolah Berstandar Nasional SMA Negeri 9 Makassar pada Program Merdeka Belajar ini menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi sekolah terkhusus bagi para guru penanggungjawab pada masing-masing mata pelajaran untuk meluluskan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Berdasarkan hasil wawancara serta dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti oleh guru SMA Negeri 9 Makassar terkait penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada program Merdeka Belajar bahwa guru diberikan kebebasan dalam menyusun RPP masing-masing guru diberikan kebebasan memilih metode atau teknik pembelajaran untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, RPP dibuat secara sistematis berdasarkan buku acuan dan metode pembelajaran yang sama setiap pertemuan.

4. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Berdasarkan hasil wawancara serta dokumentasi yang telah peneliti lakukan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 9 Makassar pada program Merdeka

Belajar tidak jauh berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Perbedaannya ada pada jalur Zonasi lebih diintensifkan untuk tidak terjadi ketimpangan akses dalam memperoleh pendidikan dengan demikian, nilai yang dimiliki oleh pendaftar tidak terlalu berpengaruh dan juga yang menjadi pembeda dari PPDB sebelumnya, pada Kurikulum Merdeka untuk jenjang kelas X sudah tidak ada pembagian jurusan sehingga pada proses pendaftaran sudah tidak ada pemilihan jurusan yang diminati oleh para pendaftar.

b) Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Merdeka Belajar

1. Ujian Nasional (UN)

Dilihat dari wawancara di atas, dalam pelaksanaan Asesmen Nasional di SMA Negeri 9 Makassar yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan adalah komputer dan jejaring internet serta perangkat lunak lainnya memadai dan dalam kondisi yang baik untuk digunakan, serta ruangan ujian juga menjadi hal pendukung. Kemudian, faktor yang menghambat pelaksanaan ujian adalah terputusnya aliran listrik yang tidak terduga-duga mempengaruhi jaringan internet yang tidak stabil sehingga waktu pelaksanaannya lebih lama dari waktu yang telah disusun dalam rangkain kegiatan

2. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

Berdasarkan penjelasan mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional oleh kedua informan tersebut bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan USBN ini adalah dari persiapan guru serta panitia yang bersangkutan terkait teknis pelaksanaan serta ruangan ujian yang nyaman bagi peserta ujian saat mengerjakan soal. Kemudian, yang menjadi faktor penghambat yang hampir sering terjadi adalah adanya keterlambatan peserta ujian memasuki ruang ujian yang akan mengganggu fokus peserta ujian lainnya.

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Dari pernyataan kedua informan di atas maka, yang menjadi faktor penghambatnya adalah jumlah peserta didik yang berada dalam satu ruang kelas itu terlalu banyak sehingga sulit untuk menyeragamkan kebutuhan mereka dan juga waktu pembelajaran yang begitu singkat.

4. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Berdasarkan pernyataan dari informan tersebut terkait faktor penghambat dalam pelaksanaan PPDB online ini adalah masih terdapat pendaftar yang kesulitan dalam mengakses situs pendaftaran yang disediakan dikarenakan kurangnya pemahaman teknologi.

PEMBAHASAN

Program Merdeka Belajar merupakan kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju, Esensi kemerdekaan berpikir, menurut Nadiem, keberhasilan suatu pendidikan harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya pada peserta didik. Program Merdeka Belajar dikembangkan sebagai kerangka Program yang lebih luwes serta berpusat pada materi mendasar serta mengembangkan keunikan dan kemampuan peserta didik.

1. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar

a) Ujian Nasional (UN)

Pelaksanaan Asesmen Nasional dimulai dari tahap sosialisasi serta simulasi dan gladi bersih oleh peserta didik yang terpilih menjadi peserta ujian yang telah dijadwalkan. Pelaksanaan dalam Asesmen Nasional ini secara teknis memiliki kesamaan dengan Ujian Nasional karena dalam ujian Asesmen Nasional juga menggunakan komputer serta ruangan yang kondusif dengan menerapkan pengawasan silang yang cukup ketat. Dengan begitu, untuk pelaksanaan Asesmen Nasional ini memerlukan persediaan sarana dan prasarana yang baik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ujian. Berbeda dengan peserta ujian dalam Asesmen Nasional bahwa peserta ujian Asesmen Nasional yakni peserta didik kelas XI pada jenjang Sekolah Menengah Atas yang dipilih secara acak oleh pemerintah sebanyak 45 orang

b) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional SMA Negeri 9 Makassar sudah dijadwalkan dari pemerintah sehingga pelaksanaan di setiap Sekolah Menengah Atas serentak. Sebelum hari pelaksanaan ujian sekolah tersebut, tahap awal yang dilakukan oleh sekolah ialah membentuk kepanitiaan USBN dalam sekolah, kemudian para guru yang bersangkutan membuat soalnya sendiri untuk dimasukkan dalam USBN, serta menyiapkan ruangan yang cukup banyak karena peserta ujiannya berbeda dengan ujian Asesmen Nasional yang di mana, semua peserta didik kelas XII harus mengikuti Ujian Sekolah Berstandar Nasional

c) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran oleh tenaga pendidik SMA Negeri 9 Makassar pada Program Merdeka, bahwa sebelum menyusun RPP para guru melakukan asesmen awal dengan *diagnostik non kognitif* untuk mengetahui bagaimana gaya belajar, kemudian bagaimana kesiapan belajar peserta didik.

d) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik baru SMA Negeri 9 Makassar berlangsung menggunakan sistem *online* mulai dari pendaftaran sampai pada tahap pengumuman untuk semua jalur pendaftaran. Sebelum Pelaksanaan PPDB, sekolah melakukan pembentukan kepanitiaan untuk menguru segala hal dalam proses pelaksanaan PPDB nantinya. Pada PPDB program Merdeka Belajar ini yang menjadi fokus utama penilaian adalah karakter serta bagaimana kemampuan awal yang dimiliki oleh calon peserta didik untuk menjadi informasi bagi sekolah kelak dalam pengembangan kompetensi peserta didik. Terkhusus untuk jalur Zonasi pada kebijakan ini yang menjadi fokus utamanya adalah jarak rumah pendaftar dari sekolah dan penerimaan untuk jalur Zonasi adalah 50%.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan secara garis besar dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar, Ujian Nasional ditiadakan dan muncul program baru yaitu Asesmen Nasional. Asesmen Nasional merupakan bahan evaluasi hasil belajar peserta didik dan sekolah untuk melihat kualitas mutu sekolah tersebut. Sebelum pelaksanaan dilakukan tahap sosialisasi, simulasi dan gladi bersih kepada peserta didik yang terpilih menjadi peserta ujian. pelaksanaan. Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional merupakan suatu penilaian yang dilakukan oleh sekolah

sebagai bahan pertimbangan kelulusan peserta didik. Persiapan pelaksanaan USBN dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh sekolah serta menyiapkan soal ujian bagi masing-masing guru mata pelajaran yang bersangkutan. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) lebih disederhanakan agar mempermudah guru atau tenaga pendidik dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mereka masing-masing sesuai dengan metode pembelajaran yang ingin diterapkan. sebelum menyusun RPP para guru melakukan asesmen awal dengan *diagnostik non kognitif* untuk mengetahui bagaimana gaya belajar, kemudian bagaimana kesiapan belajar peserta didik. Penerimaan Peserta Didik Baru pada program Merdeka Belajar yakni untuk jalur Zonasi lebih difleksibelkan dengan perluasan kuota penerimaan hingga 50%. Pelaksanaan PPDB berlangsung secara *online*.

2. Faktor pendukung Asesmen Nasional yakni sarana dan prasarana yang memadai serta yang menjadi faktor penghambat adanya arus listrik yang tidak stabil. Faktor pendukung Ujian sekolah Berstandar Nasional berasal dari sarana dan prasarana yang memadai serta yang menjadi faktor penghambat adalah adanya keterlambatan peserta ujian untuk mengikuti ujian. dalam penyusunan RPP pada program ini, guru dapat dengan mudah menyusun strategi pembelajaran, tetapi dengan kondisi jumlah peserta didik yang terlalu banyak dalam satu ruang kelas maka guru akan kesulitan menyeragamkan kebutuhan peserta didik. pada PPDB dilaksanakan secara *online* tetapi masih terdapat pendaftar yang kurang memahami teknologi sehingga mengalami hambatan dalam pendaftaran.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada orang tuaku yang mendukung dalam proses penelitian ini, terkhusus kepada Kepala sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan Guru di SMA Negeri 9 Makassar yang membantu kelancaran dalam proses pelaksanaan penelitian ini sehingga penulisan naskah artikel ini berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2014). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Aswaja Persindo.
- Afifah, U. (2022). Kurikulum Merdeka dan Penerapannya Dalam Kegiatan Pembelajaran. 2023, 1–10.
- Agnes. (2020). *Untuk Apa Aku Mengenal Pendidikan*. Guepedia.
- Ainia, D. K. (2020). Merdeka Belajar Dalam Pandangan Ki Hadjar Dewantara Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Pendidikan Karakter. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(3), 95–101.
- Alhamuddin. (2019). *Politik Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Indonesia Sejak Zaman Kemerdekaan Hingga Reformasi (1947-2013)*. Prenadamedia Grup.

- Amalia, Dwi, I. (2023). *Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Fiqih Di MAN 1 Nganjuk*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Ananda, R., & Rafida, T. (2017). *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*. Perdana Publishing.
- Aprilia, N. E. (2022). *Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Muhammadiyah 1 Semarang*. Semarang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Baro'ah. (2020). Kebijakan merdeka belajar sebagai strategi peningkatan mutu pendidikan. *Jurnal Tawadhu*, 1(4), 1063–1073.
- Daga, A. T. (2021). Makna merdeka belajar dan penguatan peran guru di sekolah dasar. *Jurnal Educatio Fkip Unma*, 7(3), 7(3), 1075–1090.
- Fitrah, M., & Luthfiah, L. (2017). *Penelitian kualitatif, tindakan kelas dan studi kasus*. CV. Jejak.
- Getteng, abd. R. (2011). *Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika*. Grha Guru.
- Hidayat, & Irwandi. (2022). Peningkatan Mutu Penyelenggara Pendidikan Melalui Forum Pemangku Kepentingan Daerah Program Sekolah Penggerak. *Jurnal Abdimas Serawai*, 1(2), 37–44.
- Kurniasih, I., & Sani, B. (2014). *Sukses Mengimplementasikan Kurikulum 2013 Memahami Berbagai Aspek dalam Kurikulum 2013*. Kata Pena.
- Lembong, J. M., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Implementasi Merdeka Belajar Sebagai Transformasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 765–777. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.4620>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Munandar, A. (2017). *Prosiding Seminar Nasional Pendidik dan Pengembang Pendidikan Indonesia dengan Tema "Membangun Generasi Berkarakter Melalui Pembelajaran Inovatif*. Aula Handayani.
- Putri, Suci, E. (2023). Implementasi Pengelolaan Kurikulum Pembelajaran Mandiri di SDIT Sabilul Huda Kota Cirebon. *Jiem of Islamic Education Manajement*, 7(1), 7–17.
- Rosad, Miftakhu, A. (2019). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembelajaran di Lingkungan Sekolah Tarbawi. *Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 5(2), 176.
- Samsudduha, A. (2023). *Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Di SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Timur*. Universitas Jambi.



- Sekretariat GTK. (2019). *Mengenal Konsep Merdeka Belajar dan Guru Penggerak*.
<https://gtk.kemdikbud.go.id/readnews/mengenal-konsep-merdeka-belajar-dan-guru-penggerak>
- Sherly, Dharma, E., & Sihombing, H. B. (2020). Merdeka belajar: kajian literatur. *UrbanGreen Conference Proceeding Library*, 1, 183–190.
- Sibagariang, D., Sihotang, H., & Murniarti, E. (2021). Peran guru penggerak dalam pendidikan merdeka belajar di Indonesia. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 14(2), 88–99. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 14(2), 88–99.
- Sibagariang, Sihotang, & Murniarti. (2021). Peran Guru Penggerak dalam Pendidikan Merdeka Belajar di Indonesia. *Dinamika Pendidikan*, 2(14), 88–99.
- Sudin, A. (2014). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Upi Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tohir, M. (2019). *Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar*.
- Ulinniam, Hidayat, Barlian, U. C., & Iriantara, Y. (2021). Penerapan Kurikulum Revisi 2013 Di Masa Pandemi Pada SMK IBS Tathmainul Qullub Indramayu. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(1), 118–126.
- Usman, N. (2002). *Konteks implementasi berbasis kurikulum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Wati, D. P. (2014). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pendidikan Agama Islam Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam*. Universitas Lampung.